

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, Dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.  
(Survey pada 28 Dinas Pemerintah Kabupaten Dan Kota Cirebon)**

**Tika Septiani, SE., M.Ak., Ak.**

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun sebelumnya mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota Cirebon.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey penjelasan (*explanatory survey method*) dengan tipe hubungan antara variabel yang diteliti adalah hubungan kausalitas. Variabel dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis jalur. Data yang terkumpul diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan responden Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan auditor (Inspektorat). Sedangkan variabel pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit internal tahun 2010.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%, hasil studi pada seluruh Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota Cirebon menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun sebelumnya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya berpengaruh negatif secara statistik pada alpha 5% tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kualitas Laporan Keuangan**

## 1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah yang terdiri kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban memerlukan instrumen yang terintegrasi. Pada level pelaporan, maka diperlukan laporan keuangan daerah yang lengkap (bersumber dari SAKD) yang disertai berbagai lampiran.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan dan pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting, penyajian laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Pada kenyataannya, berdasarkan survey yang dilakukankan oleh Nurhayati Soleha (2011) ke sejumlah Pemerintah Daerah dan informasi dari sejumlah konsultan keuangan daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pengelola keuangan Pemerintah Daerah dan khususnya SKPD tidak serta merta dapat menyusun laporan keuangan baru tersebut, terutama neraca.

Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan dihasilkan (Indra Bastian; 2007). Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (2005:11) adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah.

Sehubungan dengan pentingnya sistem akuntansi keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka diharapkan setiap satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan SAKD sebagai sistem akuntansi guna menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang "Pengaruh pemahan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Penelitian ini menyimpulkan secara simultan maupun parsial pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Jenis pendapat yang diberikan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI selama

7 tahun terakhir, pada tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Tahun Anggaran	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
	Kota Cirebon	Kabupaten Cirebon
2005	WDP	WDP
2006	WDP	WDP
2007	TMP	WDP
2008	WDP	WDP
2009	WDP	WDP
2010	WDP	WDP
2011	WDP	WDP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I- 2011

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa selama 7 tahun terakhir Opini atas LKPD Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (kecuali untuk LKPD Kota Cirebon tahun 2007 mendapat opini TMP atau tidak memberikan pendapat). Masih diberikannya opini TMP dan 7 tahun berturut-turut opini atas LKPD kedua Pemerintahan Daerah ini tidak pernah mengalami peningkatan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian, menunjukkan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) Pemerintah Daerah belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain masih banyaknya kasus pencatatan keuangan tidak/belum dilakukan atau dilakukan namun tidak akurat, penganggaran/perencanaan tidak memadai, pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya melalui mekanisme APBD dan tidak diatur dengan mekanisme yang memadai, serta belum adanya *standard operating procedure (SOP)* yang memadai.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jabar masih menemukan masih masalah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 di delapan kota/kabupaten di Jawa barat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Cirebon. Temuan tersebut terungkap

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD tahun 2011, diantaranya: (1) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada pemkab/pemkot tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Para bendahara tidak menyetorkan sisa kas pada akhir tahun anggaran secara tepat waktu, (2) Penatausahaan aset tetap belum tertib, penyajiannya belum didukung daftar rincian, belum ada penomoran atau kodefikasi. Bahkan ada aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, (3) Pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai, (4) Pengelolaan belanja daerah yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK RI menemukan realisasi belanja daerah yang belum dipertanggungjawabkan, dan (5) Ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, belanja bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja hibah dan bantuan parpol.

Hingga saat ini, menurut BPK, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum memperbaiki sistem pengendalian internal sebagaimana diamanatkan Pasal 58 UU Perbendaharaan Negara. Belum diperbaikinya sistem pengendalian intern pemerintah daerah menjadi indikator bahwa Pemerintah Daerah belum menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh BPK dan inspektorat.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun sebelumnya di lingkungan Dinas Pemerintah Kabupaten dan Kota Cirebon terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun sebelumnya baik secara simultan maupun parsial terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Dinas.

## **2. Kajian Pustaka dan Hipotesis**

### **Pengaruh Penerapan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pengertian sistem akuntansi menurut Bahtiar Arif, dkk (2009:162) adalah suatu kumpulan dari elemen-elemen seperti formulir, prosedur dan catatan-catatan baik manual maupun terkomputerisasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Sistem akuntansi memberikan prosedur tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan dihasilkan (Indra Bastian 2007: 4). Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (2010:11) adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah yang merupakan salah satu karakteristik dari laporan keuangan yang berkualitas.

Esensi dari definisi dan tujuan sistem akuntansi keuangan daerah, yang telah diuraikan diatas menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memberikan jaminan agar informasi terkait tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dapat disampaikan dengan tepat, efisien, ekonomis dengan laporan keuangan yang berkualitas.

### **Pengaruh Pelaksanaan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

COSO mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Dari beberapa definisi sistem pengendalian intern yang telah diuraikan maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena salah satu tujuan dan fungsi dari sistem pengendalian intern adalah untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang baik harus didukung dengan sistem pengendalian intern yang baik pula. Tanpa adanya pengendalian intern tidak mungkin dihasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

## **Pengaruh Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pasal 43 dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern, salah satunya dilaksanakan melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan dan reviu lainnya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah menindaklanjuti saran dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tujuan dari pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah agar temuan dan kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat diperbaiki di tahun sekarang maupun tahun berikutnya, sehingga di tahun anggaran berikutnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat menyajikan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan dan berkualitas.

### **Keterkaitan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern**

Mardiasmo (2009:35) menyatakan bahwa fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena bersifat kuantitatif. Hal senada dikatakan oleh Bahtiar Arif, dkk (2009:17) mengatakan bahwa akuntansi.

James A. Hall (2008) mengatakan bahwa dalam sistem pengendalian intern dilakukan verifikasi independen terhadap sistem akuntansi untuk mengidentifikasi kesalahan dan salah penatsiran. Sedangkan Messier et al., (2006) mengatakan keterkaitan sistem pengendalian intern dengan sistem akuntansi yaitu pengendalian digunakan untuk mengecek akurasi, kelengkapan dan otorisasi dalam proses transaksi. Sistem pengendalian intern untuk pengembangan program baru terhadap sistem akuntansi yang ada seharusnya termasuk dokumentasi dan pengujian yang memadai sebelum diterapkan. Entitas harus memiliki pengendalian yang menyakinkan bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam sistem akuntansi diotorisasi dengan baik dan entitas harus mendisain dokumen dan catatan sehingga seluruh informasi yang relevan terungkap dalam sistem akuntansi.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern memiliki hubungan dengan sistem akuntansi keuangan. Aktivitas pengendalian akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem akuntansi yang memadai. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat menentukan berjalan tidaknya sistem pengendalian intern.

### **Keterkaitan Sistem Pengendalian Intern Dengan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.**

Sistem Pengendalian Intern pemerintah terdiri atas unsur: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan, pengendalian intern. Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern pemerintah dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu implementasi dari unsur pemantauan pengendalian intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

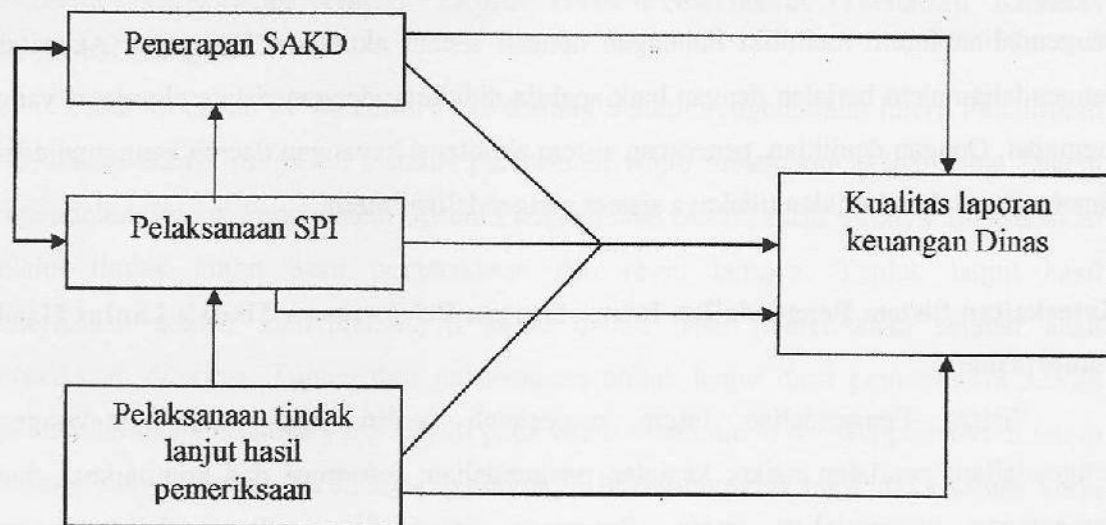
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berkaitan erat dengan sistem pengendalian intern, karena tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu implementasi dari unsur sistem pengendalian intern.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dan sebelumnya, serta teori yang mendasari penelitian ini, maka dapat disajikan paradigma penelitian yang tampak pada Gambar 2.1 berikut.

**Gambar 2.1**

**Model penelitian pengaruh penerapan SAKD, pelaksanaan SPI, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD**

Variabel Independen Variabel Dependen



### Hipotesis

Dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat diambil adalah semakin baik penerapan SAKD, pelaksanaan SPI, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik secara simultan maupun parsial diduga berpengaruh terhadap tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### 3. Objek dan Metode Penelitian

#### Objek Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen (variabel penyebab) dan variabel dependen (variabel akibat). Variabel independen pada penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI), dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sedangkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Objek penelitian dilakukan terhadap dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Cirebon.

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah seluruh dinas di lingkungan kabupaten dan Kota Cirebon sebanyak 28 Dinas dan semua anggota populasi akan diambil, dengan kata lain digunakan teknik sensus.



### Uji Validitas Dan Reliabilitas

Nilai indeks validitas setiap butir pertanyaan lebih besar dari 0.279, hasil ini mengindikasikan bahwa semua butir pertanyaan yang diajukan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Sebelum data diolah lebih lanjut dilakukan uji reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai *aronbach's alpha* masing-masing variabel tampak pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian**

Kuesioner	Jumlah pertanyaan	Koefisien reliabilitas	Keterangan
Penerapan SAKD	19	0.978	Reliabel
Pelaksanaan SPI	19	0.987	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	9	0.973	Reliabel

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20 didapat model penelitian adalah

$$Y = P_{yx1}X_1 + P_{yx2}X_2 + P_{yx3}X_3 + P_{y\epsilon}$$

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran keusioner kepada responden sebagai sumber data utama. Kuesioner terdiri dari 47 butir pertanyaan dengan rincian 19 pertanyaan mengenai penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), 19 butir pertanyaan mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 9 butir pertanyaan untuk kualitas laporan keuangan.

Jumlah sample pada penelitian ini sebanyak 25 Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis jalur sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Hasil analisis data setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta dilakukan MSI (*Method of Succesive Interval*) menunjukkan kondisi sebagai berikut :

$$Y = 0.251X_1 + 0.65X_2 - 0.033 X_3 + 0.308$$

#### Rekapitulasi Hasil Uji Ke 4 Hipotesis

Uji Hipotesis	Sig Value ( $\alpha = 5\%$ )	Kesimpulan		Keterangan
		Ho	Ha	
Ho : Semua $P_{yX_i} = 0$ ; $i = 1, 2, 3$	0%	Ditolak	Diterima	Signifikan
Ho : $P_{yX_1} = 0$	2.1%	Ditolak	Diterima	(+) dan Signifikan
Ho : $P_{yX_2} = 0$	0%	Ditolak	Diterima	(+) dan Signifikan
Ho : $P_{yX_3} = 0$	69.6%	Diterima	Ditolak	(-) dan Tidak Tignifikan

Berdasarkan dua persamaan jalur diatas, maka didapat besarnya pengaruh variabel sebagai berikut:

Dari tabel F untuk tingkat signifikan 0.05 dan derajat bebas (3,46) diperoleh nilai F tabel 2.807. Karena dari hasil penelitian diperoleh nilai F hitung (34.4502) dan lebih besar dibandingkan F tabel (2.807), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa penerapan SAKD, pelaksanaan SPI, dan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat juga dilihat nilai t-hitung variabel penerapan SAKD (2.384) lebih besar dari t-tabel (2.013). Karena nilai t hitung lebih besar

dibandingkan t tabel, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak  $H_0$  sehingga  $H_a$  diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian statistik dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa penerapan SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-Dinas di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Cirebon dengan arah positif. Arah positif artinya dengan penerapan SAKD yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas-Dinas di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat juga dilihat nilai t-hitung variabel pelaksanaan SPI (6.125) lebih besar dari t-tabel (2.013). Karena nilai t hitung lebih besar dibandingkan t tabel, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak  $H_0$  sehingga  $H_a$  diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian statistik dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa pelaksanaan SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-Dinas di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Cirebon dengan arah positif. Arah positif artinya dengan pelaksanaan SPI yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas-Dinas di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat juga dilihat nilai t-hitung variabel pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya (-0.393) lebih kecil dari t-tabel (2.013). Karena nilai t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima  $H_0$  sehingga  $H_a$  ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian statistik dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-Dinas di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Cirebon dengan arah negatif. Arah negatif artinya menurut hasil perhitungan statistik pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang baik tidak dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Dinas-Dinas di lingkungan Pemda Kota dan Kabupaten Cirebon.

## 5. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon.
- Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon dengan arah positif. Arah positif artinya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon.
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon dengan arah positif. Arah positif artinya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon.
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya berpengaruh negatif, secara statistik dengan tingkat alpha 5% tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon. Arah negatif artinya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang baik tidak dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Cirebon.

## 6. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, yakni:

- Disarankan kepada setiap SKPD khususnya Dinas untuk rutin mengirimkan pejabat dan para staff keuangannya untuk mengikuti berbagai pelatihan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintahan agar bermanfaat bagi kualitas sumber daya manusianya dalam bidang akuntansi dan pengelola keuangan.
- Disarankan kepada setiap SKPD khususnya kepala Dinas untuk secara intensif melakukan interaksi dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah khususnya

pejabat penatausahaan keuangan dan melakukan supervisi periodik agar bermanfaat bagi lingkungan pengendalian yang lebih baik lagi.

- Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan revidi audit lainnya hendaknya dipertahankan untuk tahun-tahun anggaran berikutnya sehingga tidak ada lagi penyimpangan yang ditemukan.
- Bagi peneliti yang lain, perlu dilakukan penelitian lebih luas terhadap variabel-variabel lain di luar variabel tentang peneliti uji.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2012, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat
- Bahtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar, 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Akademia
- Bastian Indra, 2007, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Bastian indra, 2007, *Audit Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- BPK-RI, 2004, *Himpunan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara*, Jakarta: P3KN
- BPK RI, 2009, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2009*, Jakarta
- Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions (COSO). *Internal Control – Integrated Framework*, 2011.
- Dyah Setyaningrum, 2012, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit. SNA XV Banjarmasin*
- Hall, James A., 2008, *Accounting Information Systems*, fourth Edition, Thomson, South-Western
- Husein Umar, 2003, *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Ghalia Indonesia
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir). SNA XI Pontianak
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Meda Yulianti, 2010, *Peran Audit Internal dan Sistem Pengendalian Intern Hubungannya Dengan Keandalan Laporan Keuangan*. Tesis, tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Unpad. Bandung.
- Muindro Renyowijiyo, 2008, *Akuntansi Sektor Publik; organisasi non-laba*, mitra Wacana Media, Jakarta
- Nurhayati soleha, 2011, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Hubungannya Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Thesis, tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Unpad. Bandung.

- Nurlan Darisc, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*, Indes, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negri No.13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negri No.59 tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Sawyer, B Lawrence. 2005. *Audit Internal Sawyer*, Terjemahan Adidat Sarman dan Bambang Pramono. Salemba Empat, Jakarta.
- Sekaran, Uma, 2010, *Research Method for Business: a Skill Building Approach*, New York: John Wiley & Sons Inc.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- The IIA. 2009. *Code Ethics*. Melalui [www.theiia.org](http://www.theiia.org)
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dipublikasikan dalam jurnal Finance & Banking Vol: 10 No: 1.
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. SNA XIII Purwokerto
- United States Government Accountability Office (GAO), 2007 revision. Melalui [www.gao.gov](http://www.gao.gov)
- <http://www.bpk.go.id>